

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PENGAWASAN PDPB KRUSIAL UNTUK WUJUDKAN PEMILU KEDEPAN YANG LEBIH BAIK**

**BANDAR LAMPUNG, 11 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas, jujur, dan adil.

PDPB merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan nasional, termasuk data warga negara Indonesia di luar negeri. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Menurut Bawaslu Lampung, keberhasilan PDPB menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Data pemilih yang akurat memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih, sekaligus mencegah berbagai permasalahan klasik dalam daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memiliki sejumlah manfaat mendasar, di antaranya:

1. Menjamin keakuratan data pemilih sebagai fondasi Pemilu yang jujur dan adil;
2. Mencegah hilangnya hak pilih warga negara;
3. Menjamin prinsip “satu orang satu suara” (one man one vote);
4. Mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.



Namun, di lapangan, Bawaslu masih menemukan berbagai permasalahan klasik dalam data pemilih, seperti:

1. Data pemilih ganda;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid;
3. Pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercantum;
4. Penduduk belum berhak namun tercatat sebagai pemilih;
5. Pemilih memenuhi syarat tetapi belum terdaftar;
6. Pemilih yang pindah domisili namun masih terdata di alamat lama;
7. Perubahan status TNI/Polri yang belum diperbarui.

Bawaslu menilai, persoalan-persoalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, antara lain:

1. Kurangnya integrasi antara data pemilih dan data kependudukan;
2. Belum sinkronnya sistem antar-penyelenggara Pemilu dan instansi kependudukan;
3. Minimnya evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil data pemilih dari Pemilu sebelumnya.

Kondisi ini, menurut Bawaslu, harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas lembaga agar data pemilih benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Lampung menegaskan bahwa di masa non-tahapan Pemilu atau Pemilihan, pengawasan terhadap PDPB tetap menjadi agenda prioritas. Bawaslu tidak berhenti bekerja meski Pemilu belum memasuki masa tahapan resmi.

Dalam masa ini, Bawaslu terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan advokasi terhadap instansi terkait seperti KPU, Dinas Dukcapil, dan pemerintah daerah, guna memastikan pembaruan data pemilih berjalan sesuai ketentuan.



“Banyak masyarakat mengira Bawaslu hanya bekerja saat Pemilu berlangsung, padahal salah satu tugas penting kami di luar masa tahapan adalah memastikan data pemilih terus dimutakhirkan secara berkelanjutan. Data yang akurat akan menjadi pondasi Pemilu yang berkualitas dan demokratis,” jelas Ketua Bawaslu Lampung.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak pilih warga negara.

“Pengawasan PDPB oleh Bawaslu sangat krusial agar Pemilu ke depan lebih baik dari sebelumnya. Data pemilih yang bersih dan valid adalah jantung dari demokrasi. Tanpa data yang akurat, hak pilih rakyat bisa terabaikan dan integritas Pemilu menjadi taruhannya,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan PDPB. “Kami mendorong semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk aktif mengawal proses pemutakhiran data ini. Setiap warga berhak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih,” lanjutnya.

Iskardo juga menegaskan bahwa Bawaslu Lampung akan terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Pemilu mendatang dapat berlangsung lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Melalui kegiatan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Lampung berkomitmen menjaga agar setiap suara rakyat memiliki nilai dan makna yang setara, serta memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.



Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan saat ini menjadi bagian penting dari upaya perbaikan menyeluruh terhadap sistem demokrasi, menuju Pemilu yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berintegritas di masa depan.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)